



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD

: PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) LEMBAGA

**UNIT KERJA** : UNIT INDUK PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA, MADURA, DAN BALI

I. DATA PRIBADI

: MUNAWWAR FURQAN 1. Nama

2. Jabatan : GENERAL MANAGER

3. NHK 205043

## II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 348.690.000

Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 23.690.000

Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

387.000.000

MOBIL, HONDA SUV/CRV Tahun 2020, LAINNYA Rp. 370.000.000

MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	182.858 <mark>.000</mark>
D. SURAT BERHARGA	Rp.	922.909.100
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	405.620.107
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Kar Kar
Sub Total	Rp.	2.247.077.207
III. HUTANG	Rp.	22.522.818
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.224.554.389

## Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

